

Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali

I Gede Made Yudi Antara, I Gede Putu Eka Suryana

Masuk: 09 01 2020 / Diterima: 24 06 2020 / Dipublikasi: 30 06 2020
© 2020 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA dan IGI

Abstract *The population in an area determines the development in an area. Human resources are closely related to the quantity and quality of the population must be a concern of the government for smooth development. Quantity can be seen from the population's number and density, while the quality of the population of an area can be seen from the Human Development Index (HDI) achieved by an area. Bali Province, with a population density of 743 people/km², has a high category HDI based on the classification issued by the Central Statistics Agency. The purpose of this study is to determine the extent to which the population quantity, i.e., population density, affects the quality of the population, as seen from the HDI achievements. The secondary data obtained were then analyzed quantitatively by regression analysis to determine the effect of population density on HDI performance and visualized by digital mapping using Arcview GIS 3.3. The results obtained that the population density significantly influences HDI achievement, thus indicating that a large population must be accompanied by an increase in the quality of human resources.*

Key words: *Population Density; Human Development Index; Mapping*

Abstrak Penduduk dalam suatu wilayah sangat menentukan pembangunan di suatu wilayah. Sumber daya manusia yang erat kaitannya kuantitas dan kualitas penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi lancarnya pembangunan. Kuantitas dapat dilihat dari jumlah dan kepadatan penduduk, sedangkan kualitas penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai suatu wilayah. Provinsi Bali dengan kepadatan penduduk 743 jiwa/km² memiliki IPM dengan kategori tinggi berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kuantitas penduduk yaitu kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kualitas penduduk yang dilihat dari capaian IPM. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh dari kepadatan penduduk terhadap capaian IPM dan divisualisasikan dengan pemetaan digital menggunakan Arcview GIS 3.3. Hasil yang diperoleh bahwa kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap capaian IPM, sehingga menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kata kunci: Kepadatan Penduduk; Indeks Pembangunan Manusia; Pemetaan

1. Pendahuluan

Provinsi Bali terdiri dari tujuh Kabupaten dan satu Kota Madya dengan karakteristik geografis dan demografi yang bervariasi. Karakteristik tersebut

menimbulkan variasi pula dalam kegiatan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/ Kota. Lingkungan Geografis terdiri dari kondisi bentang lahan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat aktifitas manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Kondisi alam Bali yang terdiri dari bentang lahan yang unik dan bervariasi tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk potensi wisata yang

ditunjang oleh kebudayaan yang berasal dari masyarakat Bali yang diwariskan secara turun temurun. Kondisi-kondisi tersebut yang menunjang kegiatan ekonomi Provinsi Bali didominasi oleh sektor pariwisata. Wilayah Provinsi Bali, dimana Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi memiliki kondisi kependudukan yang bervariasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi yang sangat dipengaruhi oleh aktifitas ekonomi dari suatu wilayah.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota sebagai salah satu bagian dari urbanisasi mempengaruhi persebaran penduduk pada masing-masing wilayah di Provinsi Bali. Kota Denpasar sebagai pusat Ibukota dan pusat dari segala aktifitas perekonomian di provinsi Bali tentu akan menjadi faktor penarik bagi penduduk di luar wilayah Kota Denpasar maupun di luar Provinsi Bali untuk ber migrasi ke Kota Denpasar. Arus migrasi yang masif menyebabkan penumpukan penduduk terutama di wilayah ibukota Provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2018, menunjukkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Denpasar yaitu 7.283 jiwa per km². Angka yang sangat timpang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Bali yaitu 743 jiwa per km². Kepadatan penduduk yang tinggi tentu akan sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Masing-masing wilayah harus mampu menjamin penduduknya agar dapat mengakses layanan yang terkait dengan kebutuhan pokok secara merata karena pembangunan sumber daya manusia sangat penting bagi pembangunan saat ini (Sarmita, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kepadatan penduduk terhadap kualitas pembangunan manusia di Provinsi Bali. Hal ini didasari oleh IPM secara langsung diukur dengan indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi dimana hal tersebut sangat terkait dengan distribusi penduduk di suatu wilayah. Distribusi dan kepadatan penduduk dianggap mempengaruhi kualitas pelayanan di suatu wilayah sehingga menarik untuk dilihat apakah daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mampu untuk memberikan pelayanan yang baik dan merata di bidang pendidikan, kesehatan maupun secara ekonomi sehingga mampu mencapai angka IPM yang baik.

Penelitian atau tulisan terdahulu yang dilakukan oleh Rochaida (2016) yaitu terkait dengan pengaruh pertumbuhan penduduk yang lebih memfokuskan pada pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi penduduk di suatu wilayah. Kemudian penelitian oleh Christiani (2014) yaitu pengaruh kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat yang lebih menunjukkan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel kualitas SDM yang digunakan yaitu IPM dengan melihat indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai indikator utama dalam capaian IPM pada suatu wilayah.

Adapun kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep kepadatan penduduk, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang biasa digunakan adalah jumlah penduduk setiap satu Km² atau setiap 1 mil.

UNDP (1997) dalam (Azahari, 2000) (menyatakan bahwa *human development* (pembangunan manusia) merujuk kepada proses “perluasan pilihan bagi masyarakat”. Perluasan ini meliputi pilihan-pilihan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih lama dan lebih sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar kehidupan yang lebih baik. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) (Sarmita, 2017). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (Badan Pusat Statistik, 2019).

2. Metode

Langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan secara general terdiri dari proses perencanaan yang dijabarkan melalui alur penelitian, dilanjutkan pengumpulan, identifikasi dan analisis data.

Penelitian dilaksanakan dengan analisis kuantitatif dengan aplikasi SPSS dan didukung dengan Arcview GIS untuk memetakan kondisi kepadatan penduduk dan capaian IPM di Provinsi Bali agar lebih informatif.

Data yang dikumpulkan terkait dengan penelitian yaitu data sekunder yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yaitu data kepadatan penduduk menurut Kabupaten sehingga diketahui distribusi penduduk per Kabupaten berdasarkan luas wilayah dan

data terkait dengan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur IPM seperti data terkait dengan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian atau pendapatan perkapita di wilayah tersebut serta capaian IPM dari masing-masing Kabupaten yang diperoleh dari gabungan tiga indikator tersebut.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial, berupa data tabel frekuensi dan persentase. Untuk mengetahui pengaruh dari kepadatan penduduk terhadap kualitas SDM yaitu dilihat dari capaian IPM di Provinsi Bali dianalisis dengan statistik inferensi yaitu regresi linier sederhana. Data kepadatan penduduk dan distribusi timbunan sampah menurut Kabupaten di Provinsi Bali kemudian dipetakan secara digital dengan aplikasi Arcview GIS 3.3 untuk memperoleh gambaran secara visual terkait dengan persebaran kepadatan penduduk dan IPM di Provinsi Bali sehingga informasi yang didapatkan lebih informatif dan menarik.

3. Hasil & Pembahasan

Kepadatan Penduduk Provinsi Bali

Provinsi Bali dengan kondisi geografis yang bervariasi dengan kegiatan perekonomian utama adalah dalam sektor pariwisata tentu akan sangat mempengaruhi distribusi penduduk di masing-masing Kabupaten (Soritua, 2015). Hal ini dikarenakan distribusi penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian, namun migrasi penduduk menjadi faktor yang sangat berpengaruh juga terhadap distribusi penduduk. Penduduk pendatang paling banyak biasanya terdapat pada daerah dengan sumber ekonomi yang memadai (Sarmita & Simamora, 2018)

Tabel 1. Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Menurut Kabupaten

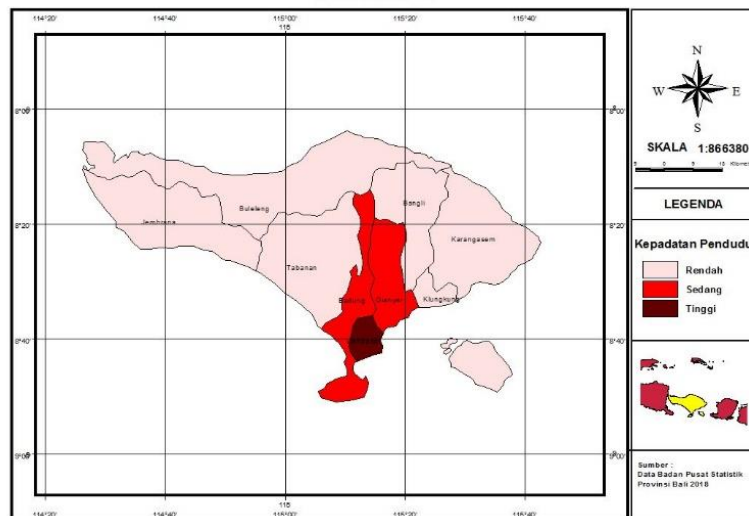
Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kab. Jembrana	329
Kab. Tabanan	437
Kab. Badung	1 569
Kab. Gianyar	1 381
Kab. Klungkung	566
Kab. Bangli	461
Kab. Karangasem	494
Kab. Buleleng	482
Kota Denpasar	7 283
Provinsi Bali	743

Sumber : (Badan Pusat Staistik, 2019)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata provinsi Bali adalah 743 jiwa/km². Menurut Kabupaten/ Kota Madya kepadatan tertinggi berada di Kota Denpasar yang jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Bali. Hal ini tentu disebabkan oleh Kota Denpasar sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan Provinsi Bali yang sebagian besar penduduknya berasal dari penduduk pendatang dari luar Kota Denpasar maupun luar Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan temuan Paturusi (2016), yang mengkaji

tentang segregasi Ruang Sosial Antara Pendatang dengan Penduduk Asli pada Permukiman Perkotaan di Denpasar. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi tersebut harus diikuti dengan pemerataan fasilitas yang memungkinkan penduduk dapat mengakses segala macam kebutuhan seperti lapangan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang erat kaitannya dengan pembangunan manusia (Rahman, 2018). Persebaran kepadatan penduduk Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.

PETA KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI BALI MENURUT KABUPATEN TAHUN 2018



Gambar 1. Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Bali

IPM Provinsi Bali

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia adalah terdiri dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian (Setiawan, 2013). Kualitas pendidikan dapat

dilihat dari salah satunya yaitu rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk di wilayah tersebut. Untuk rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Lama Sekolah (Tahun)
Kab. Jembrana	7.95
Kab. Tabanan	8.64
Kab. Badung	10.06
Kab. Gianyar	8.92
Kab. Klungkung	7.75
Kab. Bangli	7.13
Kab. Karangasem	5.97
Kab. Buleleng	7.04
Kota Denpasar	11.16
Provinsi Bali	8.65

Sumber : (Badan Pusat Staistik, 2019)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali yaitu 8,65 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kota Denpasar disusul kemudian oleh Kabupaten Badung yang masing-masing dengan rata-rata lama sekolah yaitu 11,16 tahun dan 10.06 tahun. Hal ini disebabkan oleh Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali tentu memiliki sarana-prasarana yang lebih baik dan merata dibanding Kabupaten lainnya dan memiliki lapangan kerja yang cukup

sehingga para orang tua relatif cukup mampu menyekolahkan anaknya. Hal ini sejalan dengan temuan Sulistyastuti (2007), yang menemukan bahwa masih terjadinya ketimpangan pembangunan pendidikan antara daerah Kota dan Desa. Di samping itu kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah yang mendukung jalannya pendidikan seperti keringanan biaya sekolah maupun biaya sekolah gratis dianggap mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten tersebut.

Tabel 3. Umur Harapan Hidup menurut Kabupaten di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Harapan Hidup (Tahun)
Kab. Jembrana	71.91
Kab. Tabanan	73.23
Kab. Badung	74.71
Kab. Gianyar	73.26
Kab. Klungkung	70.7
Kab. Bangli	70.05
Kab. Karangasem	70.05
Kab. Buleleng	71.36
Kota Denpasar	74.38
Provinsi Bali	71.68

Sumber : (Badan Pusat Staistik, 2019)

Tabel 3 ditunjukkan bahwa kualitas kesehatan suatu wilayah dapat dilihat salah satunya adalah dari rata-rata umur lama hidup di wilayah tersebut. Asumsinya semakin tinggi umur harapan hidup penduduk di wilayah tersebut maka semakin baik pula kualitas kesehatan di wilayah tersebut. Misalnya adalah pelayanan kesehatan yang sangat menentukan dalam penanganan penduduk yang sakit dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata umur harapan

hidup Provinsi Bali adalah 71,68 tahun. Umur harapan hidup tertinggi menurut Kabupaten dicapai oleh Kabupaten Badung. Hal ini disebabkan dengan baiknya pelayanan kesehatan di wilayah tersebut dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang juga memadai menyebabkan masyarakat dapat memeriksakan kesehatannya setiap waktu sehingga resiko kematian akibat penyakit dapat dikurangi dan dapat meningkatkan harapan hidup dari penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 4. Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 rupiah)
Kab. Jembrana	11666
Kab. Tabanan	14245
Kab. Badung	17325
Kab. Gianyar	14376
Kab. Klungkung	11318
Kab. Bangli	11160
Kab. Karangasem	10050
Kab. Buleleng	13235
Kota Denpasar	19698
Provinsi Bali	13886

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2019)

Selain pendapatan perkapita, pengeluaran perkapita juga dianggap mampu untuk mengukur tingkat perekonomian untuk masing-masing rumah tangga di wilayah tersebut. Semakin tinggi rata-rata pengeluaran perkapita di wilayah tersebut maka diasumsikan kondisi perekonomian di wilayah tersebut semakin baik yang dibuktikan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi sehingga pengeluaran meningkat. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran perkapita Provinsi Bali adalah Rp 13.886.000 pertahun. Pengeluaran perkapita tertinggi terdapat di Kota Denpasar yaitu sebesar Rp 19.698.000

pertahun. Hal ini tentu disebabkan oleh biaya hidup yang lebih tinggi karena Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi dan juga gaya hidup dari masyarakat perkotaan. Temuan ini sejalan dengan teori teori pertumbuhan model Lewis yang menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dalam sektor modern (perkotaan) sebagai pusatnya kegiatan ekonomi yang tengah mengalami pertumbuhan pesat jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan dan konstan (Hariadi, 2008). Pendapatan yang tinggi diikuti pula oleh tingkat pengeluaran yang tinggi.

Tabel 5. IPM menurut Kabupaten di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	IPM
Kab. Jembrana	71.65
Kab. Tabanan	75.45
Kab. Badung	80.87
Kab. Gianyar	76.61
Kab. Klungkung	70.9
Kab. Bangli	68.96
Kab. Karangasem	66.49
Kab. Buleleng	71.7
Kota Denpasar	83.3
Provinsi Bali	74.77

Sumber : (Badan Pusat Staistik, 2019)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat gabungan dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Provinsi Bali pada capaian IPM Provinsi Bali yaitu sebesar 74.77. Berdasarkan klasifikasi IPM, IPM Provinsi Bali berada dalam kategori Tinggi. Beberapa Kabupaten di Provinsi Bali bahkan mencapai IPM dengan

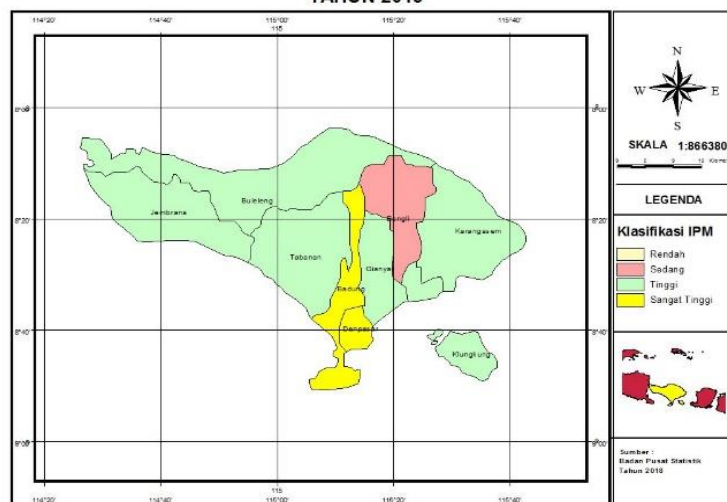
kategori sangat tinggi yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal ini sejalan dengan indikator-indikator penyusun IPM sebelumnya yang secara konsisten menunjukkan untuk dua wilayah ini selalu berada pada posisi teratas dibandingkan wilayah lainnya.

Tabel 6. Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	IPM \geq 80
Tinggi	70 \leq IPM <80
Sedang	60 \leq IPM < 70
Rendah	IPM <60

Sumber Badan Pusat Statistik

PETA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI BALI MENURUT KABUPATEN TAHUN 2018



Gambar 2. Peta Capaian IPM Provinsi Bali

Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Bali

Sumber daya manusia tidak hanya berbicara mengenai kualitas namun juga kuantitas. Kualitas penduduk yang baik akan dicapai dengan adanya sinergi yang baik antara penduduk dengan pengambil kebijakan. Jumlah penduduk yang besar

merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan dengan kualitas memadai pula (Sarmita, 2017). Berdasarkan hal tersebut dengan kepadatan penduduk yang bervariasi tiap Kabupaten di Provinsi Bali akan dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap capaian IPM.

Tabel 4. Koefisien Determinasi Variabel X terhadap Variabel Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738 ^a	.545	.480	3.99732

- a. Predictors: (Constant), Kepadatan Penduduk
- b.

Berdasarkan Tabel 3.4 diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 0,545 yang dapat

ditafsirkan bahwa variabel bebas yaitu kepadatan penduduk memiliki pengaruh kontribusi sebesar 54,5 % terhadap variabel terikat yaitu IPM dan 45,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X.

Tabel 5. Signifikansi Pengaruh dari Variabel Tingkat Kepadatan Penduduk terhadap IPM di Provinsi Bali

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	134.058	1	134.058	8.390	.023 ^a
	Residual	111.850	7	15.979		
	Total	245.908	8			

- a. Predictors: (Constant), Kepadatan Penduduk
- b. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi 0,023 sehingga $<0,05$, jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas yaitu kepadatan penduduk terhadap IPM di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan persebaran penduduk, baik kepadatan penduduk akan mempengaruhi persebaran dan kualitas fasilitas atau infrastruktur pembangunan SDM seperti fasilitas pendidikan, kesehatan maupun ketersediaan lapangan kerja suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan temuan Rumengan, (2019), Sadali, Mohammad Isnaini; Fikri Intizhar (2017), Lumbantoran (2013) yang menemukan bahwa ketersediaan berbagai fasilitas publik sangat tergantung dari keberadaan penduduk. Semakin banyak penduduk memusat di satu titik tertentu, maka keberadaan fasilitas publik semakin lengkap, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa, kepadatan penduduk yang tinggi memiliki korelasi dengan ketersediaan fasilitas pelayanan publik, yang selanjutnya dari ketersediaan fasilitas tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas manusianya. Mereka mudah dalam mengakses segala jenis fasilitas yang ada memungkinkan nilai IPMnya menjadi tinggi.

4. Penutup

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa kuantitas penduduk yang dinyatakan dengan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap capaian IPM di Provinsi Bali. Kepadatan penduduk mempunyai kontribusi pengaruh

sebesar 54,5 % terhadap capaian IPM, 45,5 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar kepadatan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari kepadatan penduduk terhadap IPM tidak terlalu besar, terdapat faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi yang menjadi faktor penentu dari capaian IPM suatu wilayah. Oleh karena itu kebijakan dan pelaksanaan pemerataan pelayanan terhadap ketiga indikator tadi oleh pemerintah dianggap menjadi faktor yang langsung berpengaruh terhadap capaian IPM. Kontribusi pengaruh yang rendah juga ditunjukkan dengan data bahwa tidak semua wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari wilayah lainnya memiliki capaian IPM yang lebih tinggi pula. Sektor terutama pendidikan, pelayanan dan kesehatan yang menjadi indikator capaian IPM. Provinsi Bali yang saat ini capaian IPM dalam klasifikasi baik dapat ditingkatkan menjadi sangat baik jika semua pihak dapat saling mendukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagi *stakeholder* terkait, hal ini dapat dijadikan sebagai masukan bahwa penduduk yang besar memiliki potensi yang sangat baik bila diiringi dengan pemerataan kualitas SDM. Mengetahui pengaruh kuantitas penduduk terhadap kualitas penduduk juga penting untuk mengetahui sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Daftar Pustaka

Azahari, A. (2000). Pembangunan Sumberdaya Manusia dan IPM Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi*

- Dan Bisnis Indonesia*, 15(1), 56–69.
- Badan Pusat Staistik. (2019). *Bali Dalam Angka*.
- Christiani, C. P. T. B. M. (2014). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Serat Acitya*, 3(1), 102–114.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/125>
- Hariadi, P. A. I. R. B. (2008). Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Economic Journal Og Emerging Markets*, 13(2), 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ejem.v13i2.222>
- Lumbantoruan, J. W. W. L. (2013). Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Geografi*, 5(2), 149–155.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jg.v5i2.8155>
- Paturusi, S. A. (2016). Segregasi Ruang Sosial Antara Pendatang dengan Penduduk Asli pada Permukiman Perkotaan di Denpasar. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 57–78.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/24349>
- Rahman, D. A. (2018). Komparasi Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk Antara Urban (Perkotaan) Dan Rural (Perdesaan) Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Buana*, 2(1), 323–337.
<http://geografi.ppj.unp.ac.id/index.php/student/article/view/80/47>
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 18(14–24).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jfor.v18i1.42>
- Rumengan, M. R. C. (2019). Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Spasial*, 6(2), 375–387.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/25320>
- Sadali, Mohammad Isnaini, Fikri Intizhar, A. (2017). Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pendukung Kondisi Darurat Bencana dan Pengembangan Wilayah. *Media Komunikasi Geografi*, 18(2), 128–145.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/mkg.v18i2.12517>
- Sarmita, I. M. (2015). Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 16(2), 65–77.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/mkg.v16i2.8430>
- Sarmita, I. M. (2017). Refleksi Kritis Kondisi Demografi Indonesia: Antara Bonus Dan Bencana Demografi. *Media Komunikasi Geografi*, 18(1), 66–76.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/mkg.v18i1.10558>
- Sarmita, I. M., Simamora, A. H. (2018). Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Tipologi Migrasi Migran Asal Jawa Di Kuta Selatan-Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 132–143.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16528>

Setiawan, M. B. A. H. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ekonomia*, 9(1), 18–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373>

Soritua, Y. (2015). Analisis Peran Sektor Pariwisata Menjadi Pendapatan Utama Daerah (Studi Banding: Peran Sektor Pariwisata di Provinsi Bali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33366/ref.v3i2.506>

Sulistiyastuti, D. R. (2007). Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia Sebuah Refleksi Kritis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 19–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jki.v2i2.146>